BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada penelitian ini akan membahas mengenai landasan teori tentang perbandingan pola manajemen keuangan pada Masjid dan kajian pustaka yang membahas mengenai perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sehingga ditemukan pemahaman yang lebih mendalam terkait judul penelitian penulis. Akan tetapi dalam pola manajemen keuangan Masjid belum terdapat teori yang membahas terkait penelitian, oleh karena itu teori yang digunakan berdasarkan pendekatan indikator dalam teori Sistem Pengendalian Manajemen.

A. Landasan Teori

1. Pengertian Perbandingan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding kemudian membandingkan yang memiliki makna mengadu dua atau lebih objek yang dikaji dengan tujuan agar menambah dan memperluas informasi mengenai objek yang dikaji. Selain itu, perbandingan merupakan salah satu cara untuk mengkaji antara satu objek dengan yang lain, yang belum diketahui kejelasannya.

2. Pengertian Pola

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan pola merupakan suatu gambar yang disusun menjadi model atau bentuk

sehingga dapat menggambarkan apa yang disusun. Sehingga apabila dikaitkan dengan manajemen, maka pola manajemen merupakan gambaran suatu proses manajemen yang diterapkan.

3. Pengertian Manajemen

Anthony dan Govindarajan (2009) menyatakan bahwa manajemen merupakan sebuah organisasi yang tersusun atas beberapa orang yang saling bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama. Apabila dikaitkan dengan keuangan, maka manajemen keuangan merupakan sekelompok orang yang mampu mengelola keuangan guna mencapai tujuan organisasi.

4. Pengertian Keuangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan keuangan berasal dari kata uang. Keuangan merupakan suatu cara atau strategi pengelolaan keuangan yang dapat berpengaruh pada rotasi organisasi. Sebagai alat tukar yang bernilai, uang terlibat dalam proses yang terjadi.

5. Pengertian Masjid

Masjid merupakan bangunan yang didirikan sebagai sarana tempat ibadah umat Islam. Namun dapat diketahui bahwasannya tempat ibadah umat Islam bukan hanya di Masjid melainkan seluruh sudut di muka bumi ini kecuali tempat tempat yang dilarang. Hal tersebut membahas mengenai luasnya permukaan bumi ini merupakan sebuah tempat ibadah, seperti sabda Rasulullah SAW :

وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

Artinya : "*Telah dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan keadaannya bersih*". (HR. Muslim)

Dari hadits tersebut dapat dipetik maknanya bahwasannya Masjid itu merupakan tempat di mana saja umat Islam dapat melakukan berbagai macam ibadah selama tempat itu tidak dilarang. Namun yang paling utama adalah Masjid sebagai tempat untuk melakukan ibadah, sesuai dengan firman Allah pada Quran Surah At-Taubah ayat 18, yakni:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ
وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ
أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Artinya : "*Hanyalah yang memakmurkan Masjid-Masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah SWT, merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang orang yang mendapat petunjuk".* (QS At-Taubah ayat 18).

Hal di atas mengingatkan bahwa, orang-orang yang datang ke Masjid dan melakukan berbagai ibadah serta aktivitas keagamaan, maka merekalah termasuk orang-orang yang mendapatkan perhatian dan balasan dari Allah SWT.

Masjid sebagai organisasi non profit yang dimana sumber daya manusia berperan sebagai aset, sebab segala aktivitasnya didasarkan oleh, dari, dan untuk manusia (Ardana, 2008). Fungsi Masjid adalah sebagai

tempat ibadah bagi umat Islam, sebagai pusat kegiatan keagamaan, sekaligus yang dianggap sebagai *baitullah* atau Rumah Allah. Berkaca pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tak hanya menjadikan Masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam melainkan juga sebagai wadah persatuan umat, wadah perekonomian, dan lain sebagainya. Dari hal di atas dapat membuktikan bahwasannya fungsi Masjid secara luas. Dapat disimpulkan bahwasannya Masjid bukan sekedar untuk tempat beribadah umat Islam melainkan juga banyak hal yang dapat dilakukan pada Masjid. Menurut Dalmeri (2014), fungsi Masjid masa kini belum dapat seperti pada masa Rasulullah SAW, antara lain :

a. Tempat ibadah umat Islam.
b. Tempat musyawarah bagi warga ataupun jamaah Masjid.
c. Tempat pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).
d. Sebagai pusat pemberdayaan umat baik dalam bentuk sosial dan ekonomi.
e. Sebagai pusat dakwah.

Realitanya sekarang ini Masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi mendirikan lembaga yang mengatur dana zakat, infaq dan shadaqah yang dapat dimanfaatkan guna pemberdayaan umat dari segi ekonomi. Oleh karena itu, Masjid harus memiliki pola manajemen yang baik sehingga dapat melahirkan kegiatan yang dapat memberdayakan umat Islam.

6. Pengertian Besar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan besar sebagai ukuran. Apabila dikaitkan dengan Masjid Besar memiliki makna bahwa Masjid tersebut memiliki pengukuran yang besar mengenai apa yang dihimpunnya. Masjid Besar yang akan dibahas pada penelitian ini merupakan Masjid yang menghimpun dana yang cukup banyak dari pihak *mustahiq*, selain itu dilihat dari jumlah jamaah yang ada pada Masjid tersebut.

7. Teori *A Clash of Jurisdictional*

Pandangan bahwa organisasi nirlaba tidak membutuhkan pengelolaan yang baik menyebabkan praktik manajemen keuangan dalam organisasi tidak ada bentuknya. Semua bentuk praktik keuangan dan pengelolaan kelembagaan hanya didasarkan pada kepercayaan tanpa mewujudkannya. Untuk mencapai misi, berdasarkan Teori *A Clash of Jurisdictional* (Abbot, 1998) terdapat pemisahan wewenang antara masing-masing profesi sehingga dalam penelitian ini peneliti menguji pemisahan wewenang melalui struktur organisasi dan pemisahan fungsi.

8. Teori *Governance*

Governance dapat dijadikan cara untuk mengelola urusan-urusan publik. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP, 1997) terdapat kriteria pelaksanaan *governance,* diantaranya sebagai berikut:

a. Partisipasi, yaitu adanya kontribusi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.

b. Aturan hukum, yaitu hukum harus adil, tanpa pandang bulu, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
c. Transparan, yaitu adanya keterbukaan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Dalam penelitian kali ini peneliti menguji keterbukaan melalui indikator pelaporan keuangan.
d. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan oleh lembaga harus diarahkan pada upaya melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
e. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai perantara mediator bagi berbagai kepentingan untuk mencapai kesepakatan.
f. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
g. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada. dalam penelitian ini penelitian menguji efektivitas dan efisiensi melalui indikator perencanaan anggaran.
h. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggungjawab kepada publik sesuai dengan apa yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menguji akuntabilitas melalui pelaporan keuangan yang disajikan.

i. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penelitian ini peneliti menguji perspektif luas dan jangka panjang melalui perumusan strategi yang dilakukan oleh Takmir Masjid.

j. Saling keterkaitan, adanya kebijaksanaan yang saling memerkuat dan terkait serta tidak dapat berdiri sendiri. Dalam hal ini peneliti melakukan pengujian ini melalui pengendalian manajemen.

Oleh sebab itu sebagai sebuah organisasi, Masjid harus memiliki manajemen yang baik. Sebagai sebuah organisasi nirlaba yang memiliki tujuan pokok bukan untuk mencari laba sudah seharusnya Masjid menerapkan pola manajemen keuangan yang baik guna merealisasikan potensi yang dimiliki.

9. Indikator Pola Manajemen Keuangan

Pola pengelolaan yang baik dapat melahirkan manfaat ekonomi yang begitu besar serta manajemen keuangan Masjid yang terjaga. Oleh karena itu, baik buruknya praktik manajemen keuangan yang ada Masjid dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

a) Struktur organisasi dan pemisahan fungsi

Griffin dan Elbert (2010) menyatakan struktur organisasi dalam sebuah organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. Oleh sebab itu, adanya

struktur organisasi dapat memperlihatkan posisi masing-masing petugas dalam sebuah lembaga keagamaan.

b) Kriteria pemilihan personalia

Umar (1998) menyatakan kriteria pemilihan personalia merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan guna menjamin bahwa mereka yang diterima adalah yang dianggap paling tepat, baik dengan kriteria yang telah ditentukan ataupun jumlah yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, Masjid harus memiliki kriteria pemilihan personalia untuk mengatur manajemennya agar dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan.

c) Perumusan strategi dalam pola pengelolaan keuangan

Anthony dan Govindarajan (2009) menyatakan perumusan sebuah strategi merupakan sebuah proses untuk pengambilan keputusan, serta mengawasi proses dalam melaksanakan suatu tugas secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, Masjid sebagai lembaga keagamaan harus memiliki strategi untuk pengelolaannya sehingga dapat mencapai tujuan Masjid tersebut.

d) Perencanaan anggaran

Anthony dan Govindarajan (2009) menyatakan anggaran merupakan salah satu rencana yang disusun untuk membuat rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga anggaran yang dibuat dapat mencapai tujuan dalam organisasi seperti alat penentu dalam melaksanakan sebuah

kegiatan. Serta dapat pula berperan sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam sebuah organisasi.

e) Pelaporan keuangan

Horngren, *et al* (2007) menyatakan akuntansi merupakan suatu proses pengolahan data keuangan yang diolah menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Pelaporan akuntansi pada organisasi nirlaba seperti Masjid memiliki perbedaan dengan organisasi lainnya. Masjid sebagai organisasi nirlaba yang mana kepemilikan harta yang diperoleh dari umat kepada pengelola Masjid, selain itu Masjid menjalankan aktivitasnya tidak untuk mencari laba. Sumber pendapatan Masjid biasanya didapatkan dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, pengeluaran rutin Masjid, serta pembiayaan aktivitas keagamaan lainnya. Banyaknya aktivitas keuangan yang dilakukan oleh organisasi nirlaba, maka peranan akuntansi diperlukan dalam segi pengelolaan keuangan. Sistem pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba seperti Masjid menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 meliputi:

(1) Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan ini memiliki informasi yang berisi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi nirlaba.

(2) Laporan aktivitas

Laporan aktivitas ini memiliki informasi yang berisi mengenai transaksi yang berpengaruh pada jumlah dan sifat aset neto, serta informasi mengenai sumber daya dalam melaksanakan suatu program.

(3) Laporan arus kas

Laporan arus kas ini memiliki informasi yang berisi mengenai pengeluaran dan penerimaan kas dalam suatu periode.

(4) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan memiliki informasi yang berisi mengenai penjelasan-penjelasan rinci atas akun – akun yang ada dalam laporan keuangan. Dalam pelaporannya organisasi nirlaba seperti Masjid menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya.

f) Evaluasi

Anthony dan Govindarajan (2009) menyatakan evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dilakukan. Evaluasi pada lembaga keagamaan seperti Masjid dapat digunakan sebagai alat pengontrol untuk mengukur apakah kegiatan atau program yang direncanakan sudah terealisasi dengan baik. Selain itu juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi pihak pengambil keputusan untuk mengambil kebijakan yanga nantinya akan dilakukan.

g) Pengendalian manajemen

Anthony dan Govindarajan (2009) menyatakan pengendalian manajemen merupakan sebuah proses pengendalian yang formal meliputi segala bentuk yang didiskusikan.

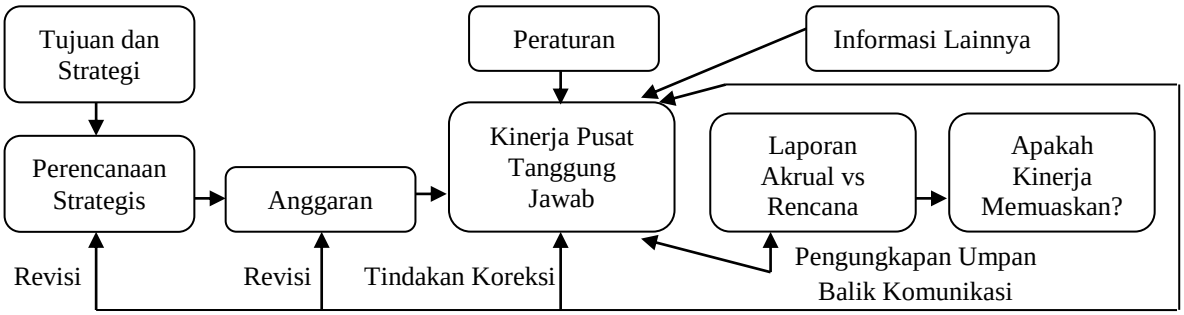

Sumber: Anthony dan Govindarajan (2009)

Gambar 2.1
Proses Pengendalian Manajemen

Pengendalian manajemen pada lembaga nirlaba seperti Masjid sangatlah penting dan hal tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk sehingga dapat mencapai tujuan Islam yang mana Masjid mampu memberikan manfaat pada masyarakat sekitar. Sebagai organisasi nirlaba, sistem pengendalian manajemen yang ada di Masjid harus berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam lembaga tersebut belum memiliki pengukur kinerja yang seutuhnya dan dikelola oleh pihak yang dianggap profesional.

10. Pengelolaan Dana Masjid

Masjid memiliki potensi sumber dana dari jamaah. Telah dijelaskan bahwasannya umat Islam wajib menyisihkan sebagian harta bendanya untuk kaum yang membutuhkan. Seperti yang terjadi saat bulan Ramadhan kegiatan penyaluran zakat fitrah dan zakat maal, serta setiap

harinya berupa infaq dan shadaqah berpotensi pada penerimaan dana pada Masjid. Potensi pengelolaan dana Masjid sangat riskan terjadi apabila digunakan secara konsumtif karena tidak akan memberikan manfaat pada kaum yang membutuhkan. Oleh karena itu, umat Islam harus mampu mengelola dana sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi pada kaum yang membutuhkan dengan adanya *mustahiq* dan *muzakki*.

Era masa kini Masjid dituntut harus memiliki pola manajemen keuangan yang baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Sebenarnya sudah banyak Masjid yang memiliki kepengurusan didalamnya, namun masih dirasa kurang dalam hal pengaturan dan pengelolaan dana Masjid. Sehingga dana yang diperoleh akan lebih efektif apabila dikelola secara produktif. Sehingga seperti salah satu Masjid yang ada memiliki potensi dana mandiri sebagai salah satu prinsip Masjid tersebut.

Menurut Dalmeri (2014), potensi Masjid yang baik ini dapat dikembangkan sebagai unit usaha antara lain seperti :

a) Baitul Maal.
b) Wartel.
c) Kamar mandi umum.
d) Penitipan barang.
e) Jasa ambulan.
f) Toko penyedia yang dimiliki oleh Masjid, dan unit usaha lainnya.

B. Kajian Pustaka

Dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, beberapa terdapat membahas Keuangan Masjid, namun belum ada yang mengambil tema mengenai Pola Manajemen Keuangan Masjid yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menambah wawasan peneliti dalam membuka dan mengembangkan pola pikir, serta sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan Keuangan Masjid antara lain.

Penelitian Adnan (2013) membahas tentang adanya arus kas yang cukup signifikan atas perolehan dana infaq pada 50 Masjid yang menjadi sampel penelitian, selain itu prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sudah dimplementasikan hanya saja perlu perbaikan serta belum adanya anggaran periodik dan bentuk strategi penganggaran. Keterbatasan penelitian ini hanya berfokus arus kas yang bersumber dari dana infaq, sehingga disini peneliti akan mengembangkan pola pikir mengenai strategi Manajemen Keuangan Masjid yang baik dan dapat diterapkan pada organisasi nirlaba seperti Masjid.

Penelitian Mohamed, *et al* (2014) membahas tentang isu yang terjadi dalam pengelolaan dana pada organisasi nirlaba dimana perolehan dana yang dihimpun adalah dari pihak lain. Akuntabilitas dan pengendalian internal yang berperan dalam sistem pengelolaan dana Masjid. Keterbatasan penelitian ini terbatas pada dua isu yaitu akuntabilitas dan pengendalian internal, oleh sebab itu peneliti ingin memperluas penelitian dengan menambah beberapa indikator yang menunjang manajemen keuangan Masjid.

Penelitian Sanusi, *et al* (2015) membahas tentang pengaruh sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan, dan praktik akuntabilitas Masjid. Pada penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan oleh bendahara secara tepat dan akurat dapat meningkatkan akuntabilitas Masjid. Keterbatasan penelitian ini berdasarkan kuesioner yang diberikan pada bendahara Masjid, oleh karena itu peneliti ingin menemukan temuan baru melalui metode wawancara.

Penelitian Simanjuntak dan Januarsi (2011) membahas tentang akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan. Dari penelitian tersebut diketahui bahwasannya transparansi dan akuntabilitas yang terjadi tidak begitu kuat, salah satunya bentuk himbauan untuk melaporkan yang dikomunikasikan kepada *mustahiq*. Masyarakat dan institusi pemerintahan tidak mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi, serta tidak mensyaratkan penggunaan laporan keuangan modern. Keterbasan penelitian ini hanya berfokus pada bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada Masjid, sehingga peneliti ingin menambah wawasan dalam Manajemen Keuangan Masjid yang baik sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45.

Penelitian Nariasih, dkk (2017) membahas tentang perbandingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK nomor 45 dan PSAK nomor 109. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh Masjid masih dalam bentuk buku kas sederhana. Keterbatasan penelitian ini berfokus pada penyusunan laporan keuangan

berdasarkan PSAK nomor 45 dan PSAK nomor 109, oleh sebab itu peneliti ingin memperluas wawasan dalam proses pengelolaan keuangan hingga penyusunan laporan keuangan yang dilaporkan oleh Masjid kepada publik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah penelitian sebelumnya juga membahas mengenai Keuangan Masjid. Akan tetapi pada penelitian sebelumnya belum membahas secara mendalam mengenai pola manajemen keuangan yang diterapkan pada masing-masing Masjid dan indikator manajemen Masjid yang baik seperti apa dikarenakan fokus penelitian sebelumnya berbeda. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada Perbandingan Pola Manajemen Keuangan pada Tiga Masjid Besar di Yogyakarta dengan berdasarkan pada beberapa indikator diantaranya yaitu struktur organisasi dan pemisahan fungsi, kriteria pemilihan personalia, perumusan strategi dalam pola pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, pelaporan akuntansi, serta evaluasi.